

**Kebutuhan Pelayanan Sosial
Derita Ganda Korban Pascaerupsi Gunung Merapi
Social Service Needs
for Double-Misery Victims of Merapi Mountain Post-eruption**

Siti Wahyu Iryani

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
Jalan Kesejahteraan Sosial Nomor 1 Nitipuran Yogyakarta Yogyakarta. Telpon (0274) 377265.
Diterima 28 Mei 2014, direvisi 12 Juni, disetujui 27 Juni 2014.

Abstract

As natural process which its intensity is more than normal, Merapi eruption disaster in Magelang Regency brings human victims, injuries, loss properties, social infrastructure, societal economic hinges, and refugees eruption impact. This research is done to describe double miseries and its social service needs of Merapi post eruption victims. This research uses survey method and implemented through qualitative-descriptive technique. The result shows that total human victims caused by Merapi post-eruption are 5006 people (1.891 family unit). They flee to five under districts and stay at emergency shelters. The disaster ruins 442 houses and 20.712 hectares of land. The victims suffer double miseries, form the eruption and post eruption impacts. The need for victims social services are medicines, health service, rehabilitation devices for buildings, irrigation, forestry, communication, transportation, and land ownership management. It is recommended that local government, including lower level governmental management (desa, RW, RT) enable to mediate the distribution of aid and assistance because those institutions are the ones who know the local problem, condition, and needs of its environment.

Keywords:

Double Miseries-Merapi Pos-eruption Victims-Social Services

Abstrak

Sebagai proses alam yang intensitasnya melebihi normal, bencana alam erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang menimbulkan dampak korban jiwa, korban luka, kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur sosial, dan sendi-sendi perekonomian masyarakat, serta pengungsian terdampak erupsi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan derita ganda dan kebutuhan pelayanan sosial korban erupsi dan pascaerupsi Gunung Merapi. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa jumlah korban keseluruhan akibat bencana alam pasca erupsi yang mengungsi di sejumlah tempat penampungan sementara (Huntara) sebanyak 5006 orang (1.891KK) yang tersebar di lima kecamatan. Kerusakan rumah dan lahan pertanian mencapai 442 buah dan 20.712 hektar. Sebagai pengungsi, korban pasca erupsi Gunung Merapi mengalami derita ganda, selain terpukul akibat erupsi, masih harus terpukul lagi akibat post-erupsi. Kebutuhan pelayanan sosial pelayanan sosial korban erupsi merapi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain obat-obatan dan pelayanan medis; bahan-peralatan rehabilitasi bangunan, perkebunan, irigasi dan perhubungan; perlindungan dan pengembalian kepemilikan. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya pemerintah setempat melibatkan pemerintah desa/dusun/RW/RT. Sebagai ujung tombak dalam melakukan mediasi pelayanan sosial, fungsi kepala dusun, rukun warga, dan rukun tangga perlu dimaksimalkan, karena aparat pemerintah yang paling bawah tersebut yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan warga di lingkungannya.

Kata Kunci:

Kebutuhan Pelayanan Sosial-Derita Ganda-Korban Erupsi

A. Pendahuluan

Di Indonesia, 60 gunung berapi yang masih aktif, paling banyak tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan Pulau Maluku. Gunung Krakatau, Tambora, dan Merapi adalah gunung yang terkenal karena letusan dan keaktifannya yang dahsyat. Khusus Gunung

Merapi, sejak abad X sudah meletus 80 kali (<http://almadlegowo.blogspot.com/2013/07/ring-of-cincin-api.html>. akses 28 april 2014). Bencana Gunung Merapi juga masih belum menghilang dari ingatan masyarakat Magelang Selatan, Jawa Tengah, karena letusan pada tanggal 26 oktober 2010 yang memuntahkan ribuan ton lahar dan awan panas. Peristiwa tersebut

mengakibatkan puluhan kampung di sekitarnya luluh lantah dan semua aktivitas sosial ekonomi lumpuh total. Kerusakan paling parah tampak pada rumah penduduk dan sumber kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber kehidupan utama penduduk. Derita demi derita terus dialami masyarakat sekitar Gunung Merapi. Belum sempat derita akibat letusan gunung Merapi berlalu, bencana kembali berulang. Masyarakat yang menjadi korban masih harus menghadapi hantaman bencana banjir lahar dingin pasca-erupsi. Bencana pascaerupsi terjadi setengah bulan setelah erupsi merapi, yang secara mendadak masyarakat dikejutkan kembali oleh datangnya banjir lahar dingin yang membawa material berupa air lumpur, pasir, dan bebatuan. Bencana yang memporakporandakan daerah Magelang Selatan datang melalui empat tahap. *Pertama*, pada tanggal 5 Desember 2010 pukul 11.30, membawa dampak pada tertutupnya jalan utama yang menghubungkan Kota Yogyakarta, Magelang, dan Semarang, sehingga aktivitas ekonomi ketiga kota tersebut menjadi terganggu. *Kedua*, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2010, pukul 16.00, berdampak pada tenggelamnya sarana ekonomi Pasar Jumoyo yang tertimbun ribuan ton pasir lahar dingin. *Ketiga*, hari Senin, tanggal 3 Januari 2011 pada pukul 18.30, berdampak pada tertimbunnya sebagian besar pemukiman penduduk Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam. *Keempat*, pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2011 pada pukul 20.00. Bencana yang terakhir ini membawa dampak lebih parah pada tertimbunnya pemukiman penduduk di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Muntilan, Salam, Mungkit, Ngluwar, dan Kecamatan Srumbung. Ditemukan 14 Desa di lima kecamatan yang terdampak bencana banjir lahar dingin. Desa tersebut antara lain Desa Muntilan, Adikarto, Gondosuli, Tamanagung, Jumoyo, Sirahan, Seloboro, Sucen, Gulon, Ngrajek, Progowati, Srubung, Blongkeng, Banyubiru, dan Desa Banyudono.

Erupsi dan pasca erupsi gunung merapi menyebabkan penderitaan yang harus dihadapi sebagian masyarakat Kabupaten Magelang yang berada di sisi barat dan barat laut gunung paling

aktif di dunia. Masyarakat Kabupaten Magelang yang tinggal di sisi selatan, berjumlah 257.261 warga dan 23,80 persen dari jumlah 1.080.500 orang, harus menanggung kerugian karena rusaknya rumah tempat tinggal, sarana usaha (tempat jualan, ruang usaha, sawah, ladang, kebun), sarana dan prasarana listrik dan komunikasi, infrastruktur umum (jalan, jembatan, saluran irigasi, pasar) akibat banjir lahar dingin. Keunikan korban pasca erupsi di Kabupaten Magelang dibanding dengan korban bencana alam lain (banjir, tanah longsor dan gempa bumi) adalah kerugian jiwa raga secara kuantitas sangat kecil, tetapi kerugian yang besar justru terjadi pada sumber ekonomi masyarakat, dalam bentuk sawah, ladang, kebun, tempat usaha dan kerja, sehingga pemulihan pada kerusakan sumber ekonomi tersebut memakan waktu lama dan sulit dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

Kemampuan bangkit kembali secara mandiri mengalami kesulitan disebabkan korban mendadak dalam waktu singkat kehilangan modal kerja dan usaha akibat tertimbun lahar dingin. Korban tidak dapat menyelamatkan modal usaha karena dalam bentuk tanaman pertanian dan kebun, barang dagangan di toko dan kios pasar, yang secara cepat tertimbun lahar dingin, bahkan hanyut terbawa arus deras lahar dingin. Korban sulit segera beralih kerja dan belum tentu berhasil. Korban sulit memulai kerja dan usaha karena sarana dan prasarana untuk memulai tidak ada sama sekali. Bantuan untuk menopang kebutuhan hidup dari pihak luar (pemerintah atau swasta) semakin lama semakin menipis.

Setiap bencana apapun jenisnya dapat dipastikan selalu menyisakan kesedihan, duka, derita dan nestapa yang mendalam serta bertumpuknya berbagai masalah bagi korban. Demikian juga bencana erupsi dan pasca erupsi gunung merapi yang terjadi secara berulang di Magelang Selatan. Kesedihan masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat terpaan awan panas dan tertimbun abu gunung merapi yang menimpa rumah, pekarangan, sawah, kebun, dan ladang. Kondisi derita ganda korban pascaerupsi Gunung Merapi tersebut mendorong untuk dilakukan pengkajian ini, dengan perta-

nyaan sebagai berikut: Bagaimana derita ganda korban erupsi dan pasca erupsi Gunung Merapi?. Bagaimana kebutuhan pelayanan korban erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan derita ganda dan kebutuhan pelayanan sosial korban erupsi dan pasca erupsi Gunung Merapi?.

B. Kajian Teori

Bencana Alam: merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Suatu fenomena atau kejadian alam atau bencana sosial dikategorikan sebagai bencana apabila mengakibatkan korban dan penderitaan, kerusakan alam lingkungan, kerugian harta benda dan nyawa, sarana prasarana, dan fasilitas social ekonomi serta menimbulkan gangguan tata kehidupan masyarakat (Jason Morrow, 2011). Apabila fenomena tersebut tidak sampai mengakibatkan korban, kerugian dan penderitaan bagi manusia, maka fenomena alam tersebut disebut fenomena biasa. Di Negara-negara maju, dampak ekonomi pasca-bencana sudah disiapkan secara matang dengan program yang dikenal dengan istilah disaster reducing risk management (Margareta Wahlstrom, 2013: 7), yang dirancang atas dasar pengalaman bahwa dampak ikutan bencana alam ternyata membawa resiko kerusakan ekonomi yang membutuhkan biaya yang tidak kalah besarnya dengan biaya yang dibutuhkan bagi rehabilitasi korban bencana. Di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai daerah rawan bencana (*disaster prone*), program tersebut belum dilakukan secara jelas kecuali usaha spontanitas dan sporadis dari kalangan pengusaha yang memang sejak dini sudah sadar bahwa usahanya yang berkedudukan di wilayah rawan bencana (Quarentelli, EL, 1998: 268), perlu kerja sama lintas sektoral antara pemerintah dan swasta, untuk mempertahankan dan menumbuhkan usaha yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana akibat dampak ikutan bencana alam. Resiko ekonomi akibat bencana membutuhkan biaya besar dibandingkan kebutuhan pemulihan (*re-*

habilitation) korban dan harta bedanya (Gunanto Surjono, 2013: 295).

Faktor Penyebab Bencana Alam: Dua penyebab utama bencana, pertama adalah alam, secara alami bencana alam akan selalu terjadi di muka bumi, misal tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda-benda dari langit ke bumi (misal meteor), tidak adanya hujan disuatu lokasi dalam waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan kekeringan atau sebaliknya curah hujan yang tinggi disuatu lokasi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Kedua, manusia bencana oleh aktifitas manusia oleh aktifitas manusia terutama akibat eksplorasi alam yang berlebihan. Eksplorasi ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan ini mengakibatkan kebutuhan pokok dan non pokok meningkat, kebutuhan infrastruktur meningkat, alih tataguna lahan meningkat (Buletin Malimpa Edisi 13/II/2007:4).

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bencana sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam (*natural disasters*), atau faktor non alam atau faktor ulah manusia (*man made disasters*), sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi (Hadi Purnomo 2010: 56-58) Bencana alam datangnya tiba-tiba atau progresif, yang menimbulkan dampak yang dahsyat dan hebat, sehingga komunitas yang terkena atau terpengaruh harus merespons dengan tindakan darurat cepat dan segera. Kementerian Sosial mendefinisikan bencana alam sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, tsunami (gelombang pasang), angin ribut, kebakaran hutan, kekeringan, gas beracun, dan bancir lahar yang dapat menyebabkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan (Departemen Sosial 1999:13).

Bunsen (1994: 15) mengungkapkan, bahwa penyebab bencana alam karena faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam meliputi gunung me-

letus dan gempa bumi, kondisi ini pada umumnya diawali dengan tanda-tanda suhu di sekitar naik, banyak sumber mata air kering, sering timbul gempa bumi, banyak binatang yang berpindah dan sering terdengar suara gemuruh. Danudasi (tanah longsor), yaitu peristiwa pengelupasan atau penelanjangan batuan induk yang telah mengalami proses pelapukan sehingga tanah menjadi longsor. Pelapukan, yaitu peristiwa hancurnya batuan yang awalnya karena pengaruh dari luar kulit bumi. Erosi atau pengikisan, yaitu peristiwa terbawanya material batuan atau tanah oleh pengerjaan air, angin dan gletser. *Soil creep* (tanah menjalar), bencana ini disebabkan oleh batuan yang sudah lapuk jenuh air pada tanah miring. Gejala tanah menjalar tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dapat diamati dengan melihat pepohonan atau tiang listrik yang condong.

Bencana oleh faktor Manusia, disebabkan gencarnya pembangunan fisik, terutama di kota yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam; Banyaknya pengerukan areal rawa-rawa; Pembangunan perumahan yang dilakukan dengan cara memampras daerah perbukitan dan memabati pepohonan (*cut and filled*); Kebakaran hutan; Pembangunan rumah dan gedung-gedung kaya yang dapat menimbulkan pemanasan global. Tabel 1 ditampilkan secara ringkas sejumlah penyebab bencana dari faktor alam, manusia, dan kombinasi keduanya.

Tabel 1. Faktor Penyebab Bencana Alam

Ancaman Bencana Alam	Ancaman Bencana Ulah Manusia	Ancaman Bencana Campuran Alam dan Ulah Manusia
1. Gempa Bumi	1. Konflik	1. Banjir
2. Tsunami	2. Perang	2. Longsor
3. Gunung Api	3. Serangan teroris	3. Kebakaran Hutan
4. Angin Topan dan Badai	4. Kegagalan teknologi	4. Kekurangan pangan
5. Longsor	5. Hama Penyakit	
6. Kekeringan	6. Pembalakan Hutan	

Jenis-jenis bencana menurut UU SDA Tahun 2004 dan Carter (1991) dengan kolaborasi di antaranya angin topan, banjir lahar dingin, erosi dan sedimentasi, gempa bumi, intoksikasi, kebakaran, kecelakaan besar, kerusakan masa,

letusan gunung berapi, perembesan, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, tanah ambles, terancam punahnya jenis tumbuhan dan atau satwa, wabah penyakit atau epidemi, kekeringan, longsor, dan tsunami, dan banjir.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian dampak korban pascaerupsi Merapi menggunakan survai, diimplementasikan dengan teknik sebagai berikut. Pemilihan responden menggunakan teknik purposif, dalam arti responden dipilih berdasar pertimbangan orang yang mengetahui secara langsung peristiwa pascaerupsi Merapi, meliputi Petugas badan daerah penanggulangan bencana, tokoh formal masyarakat (kepala dusun setempat); Tokoh informal masyarakat khususnya yang menangani korban; korban pascaerupsi berdasar kategori korban sebagai kepala rumah tangga atau salah satu tulang punggung keluarga karena dipandang mengetahui jumlah kerugian harta benda dan kebutuhan pelayanan dibanding anggota keluarga yang lain. Dari penggunaan teknik pemilihan dan menentukan jumlah responden tersebut, ditemukan 23 orang yang dapat memberi data dan informasi secara komprehensif yang merepresentasikan kondisi korban pasca erupsi Merapi.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Magelang karena didasari pertimbangan, bahwa daerah ini merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang masyarakatnya mengalami kerugian paling parah dan bervariasi dibanding kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. **Pengumpulan data**, menggunakan teknik wawancara dengan panduan wawancara (*interview guides*). Teknik ini dipilih berdasar pertimbangan, bahwa responden sebagai masyarakat desa, tinggal bekerja dan berusaha di perdesaan, sehingga dipandang lebih fleksibel apabila digunakan teknik wawancara. Observasi bebas yang meliputi aspek: Kondisi korban secara umum dan kondisi geografis. Telaah dokumen, yang menyangkut inventarisasi korban serta kerugian harta benda dan sumber penghidupan yang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah setempat. **Analisis data**, menggunakan teknik deskriptif kualitatif pada

aspek, jumlah korban pasca erupsi yang dibagi dalam kategori ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kerugian berupa rusaknya tempat tinggal yang dibagi dalam kategori ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Analisis juga dilakukan secara makro yang berkaitan dengan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal korban, meliputi fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap pemulihan hidup korban.

D. Hasil Penelitian: Derita Ganda Korban Pascaerupsi Gunung Merapi

Tekstur Geografi Rawan Bencana di Magelang Selatan: Hamparan lereng gunung berapi terletak di sebelah selatan Kabupaten Magelang yang hanya dilindungi tebing tipis gunung merapi dibanding dengan sisi-sisi lainnya di utara, timur, selatan sehingga tebing Gunung Merapi yang terletak di kabupaten Magelang bagian selatan rawan gugur dan menjadi arah turunnya lahar dingin pasca erupsi. Magelang selatan yang terletak di sebelah barat dan barat daya Gunung Merapi juga menjadi kecenderungan tujuan arah angin yang selalu datang dari selatan, sehingga ketika Gunung Merapi mengeluarkan semburan awan panas mengarah ke barat dan barat daya, karena angin dari selatan membentur puncak merapi di sebelah selatan yang tinggi, sehingga arah angin berbelok menuju ke arah barat dan barat daya yang menjadi wilayah sebelah selatan Kabupaten Magelang.

Tekstur Geografi wilayah bagian selatan Kabupaten Magelang juga dilewati empat sungai (Kaliputih, Pabelan, Blongkeng, Lamat) yang berhulu di puncak gunung merapi, sehingga keempat sungai tersebut berpotensi membawa material lahar dan bebatuan yang berasal dari puncak Gunung Merapi, terutama apabila hujan deras di puncak merapi. Namun ketika Gunung Merapi tidak erupsi, hamparan geografis Kabupaten Magelang selatan merupakan tanah pertanian yang sangat subur, karena wilayah Magelang selatan berada di antara empat sungai berhulu di puncak Merapi. Apabila tidak banjir, sedikit demi sedikit air dari keempat sungai tersebut membawa abu vulkanik yang

dapat menyuburkan tanaman pertanian dan perkebunan. Akan tetapi apabila erapi erupsi, permukiman penduduk yang kebetulan berada di lembah antara keempat sungai tersebut menjadi sangat rawan tertimbun lahar panas dan dingin dari Gunung Merapi. Menurut prediksi BMK, deposit lahar yang menumpuk di sekitar Gunung Merapi baru akan habis dibawa air hujan dalam kurun waktu lima musim penghujan, dengan asumsi bahwa selama lima musim penghujan (terhitung sejak bulan Desember 2010) Gunung Merapi tidak mengalami erupsi lagi. Ancaman banjir lahar dingin akan lebih tenggang musimnya apabila Gunung Merapi erupsi lagi sebelum tenggang waktu musim penghujan habis.

Bencana alam pascaerupsi Gunung Merapi dalam bentuk banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Magelang selatan di satu sisi dapat dikategorikan sebagai bencana alam murni (*pure natural disaster*), karena semata-mata merupakan akibat dari erupsi merapi yang berasal dari gerak magma dari dalam bumi yang tersalur melalui puncak Gunung Merapi. Akan tetapi di sisi lain juga dapat dikategorikan sebagai bencana karena ulah manusia (*menmade disaster*), karena adanya penebangan pohon dan eksploitasi pasir di lereng sebelah barat merapi. Sehingga ketika terjadi hujan deras deposit lahar yang berada di puncak gunung dengan mudah terbawa air hujan ke bawah tanpa penghambat, sehingga menimbulkan banjir lahar dingin yang menimbun pekarangan, perkebunan, dan tanah pertanian masyarakat di kaki Gunung Merapi, namun *pure natural disaster* atau *menmade disaster*, fakta menunjukkan bahwa korban telah terjadi, sehingga dengan adanya fakta korban, dari aspek sosial kemudian mendesak untuk dilakukannya pelayanan sosial agar dapat memulihkan kondisi kondisi kehidupan korban seperti saat sebelum terjadi bencana pasca erupsi.

Kerusakan dan Jumlah Korban: Jumlah korban keseluruhan akibat bencana alam pasca erupsi mencapai sebanyak 5006 orang, yang bernaung dalam 1.891 satuan keluarga. Rincian korban per kecamatan, dapat dideskripsikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Korban Perkecamatan

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Orang
1	Muntilan	5	1.802
2	Salam	4	1.825
3	Mungkit	1	565
4	Ngluar	1	479
5	Srumbung	3	335
Jumlah Total		14	5.006

Sumber:BDPB Kabupaten Magelang (2013)

Dari hasil wawancara secara random yang mempresentasikan pengungsian di 14 lokasi pengungsian, mereka sudah mendapat pelayanan sosial dalam bentuk pemberian bantuan uang sebesar Rp 4.500 dan 4 ons beras per hari/orang selama masa tanggap darurat kurang lebih tiga bulan. Namun pelayanan sosial untuk rehabilitasi rumah dan sumber penghidupan (kebun, sawah, ladang) mereka belum menerima sama sekali, padahal korban sudah tinggal di pengungsian selama lebih dari satu bulan. Beruntung korban masih dapat bantuan kebutuhan pokok sehari-hari dari posko bantuan yang berasal dari bantuan spontanitas masyarakat umum, sehingga dapat meringankan kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari selama mereka melakukan rekonstruksi, rehabilitasi rumah dan sumber penghidupan mereka. Jumlah kerusakan rumah warga secara global dapat dideskripsikan dalam Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Kerusakan Rumah Warga

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Kadar Kerusakan				Total
			Ringan	Sedang	Berat	Berat Sekali	
1	Muntilan	74	1	4	39	9	21
2	Salam	280	41	38	92	60	67
3	Mungkid	75	7	45	16	-	8
4	Ngluar	11	-	3	-	-	8
5	Srumbung	2	-	-	2	-	-
Jumlah		442	49	98	149	69	105

Sumber: BDPB Kabupaten Magelang (2013)

Di samping sejumlah rumah penduduk yang rusak dalam berbagai gradasi kerusakan, ada rumah penduduk yang rawan terancam rusak karena berdekatan dengan jalur sungai yang airnya berpotensi membawa material lahar dingin dari puncak Merapi. Rumah penduduk yang terancam bencana berada di wilayah Kecamatan Dukun, sebanyak 21 rumah di Desa Banyubiru satu (1) rumah, dan di Desa Banyudono 21

rumah. Infrastruktur yang mengalami kerusakan terdiri dari sembilan jembatan di Desa Talun, Gowoksabrang, Gondosuli, Gunung lemah, Bojong, Mendut, Mantingan, Tlatar. Jalan aspal yang rusak karena berubah menjadi sungai pasir ada di desa Mangunsuko, dan Sirahan. Jaringan yang listrik mengalami kerusakan di beberapa titik memutus telekomunikasi 281 sambungan telepon rumah. Peristiwa Bencana erupsi yang terjadi pada tahun 2011 tersebut berdampak pada berbagai kerusakan sosial ekonomi, yang belum direkonstruksi secara keseluruhan.

Bencana alam banjir lahar dingin di Kabupaten Magelang Selatan pada dasarnya tidak menimbulkan korban jiwa dan raga penduduk, tetapi merusak sumber ekonomi penduduk terutama dalam bentuk kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, dan sumber usaha ekonomi di antaranya pertokoan, pasar, dan warung makan. Gambaran luasnya kerusakan lahan dan jenis tanaman pertanian penduduk tersaji dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Luas Kerusakan Lahan dan Jenis Tanamam Pertanian

No	Jenis Tanaman	Dalam Hektar	No	Jenis Tanaman	Dalam Hektar
1	Padi	10.164	9	Brokoli	191
2	Jagung	5.781	10	Kobis	987
3	Ubi Kayu	2620	11	Buncis	240
4	Ubi Jalar	527	12	Kentang	118
5	Kacang Tanah	135	13	Tomat	209
6	Kacang Panjang	238	14	Wortel	323
7	Cabe Merah	1.000	15	Bawang	294
8	Cabe Rawit	247	16	Sawi	239
			17	Terong	68
Jumlah		20.712	Jumlah		2.669
Total Kerusakan Tanaman Pertanian 23.381 hektar					

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Magelang (2013)

Masing-masing jenis tanaman pertanian yang mengalami kerusakan kadang-kadang dapat menempati lahan yang sama dengan tanaman pertanian lain, sehingga lahan rusak yang ternominasi lebih luas dari luas lahan riil yang ada di Kabupaten Magelang Selatan karena adanya duplikasi perhitungan lahan pertanian setiap jenis tanaman. Kerusakan lahan pertanian yang tercatat merupakan tingkat kerusakan yang signifikan, dalam arti tanaman

pertanian dan perkebunan yang sejak dari tahap awal tanam, dan siap panen benar-benar mengalami kerusakan dan hampir tidak ada yang diharapkan hasilnya, sehingga setelah banjir lahar dingin, pemilik lahan benar-benar kehilangan sumber penghidupan dan hanya menggantungkan dari bantuan dan uang tabungan yang dimiliki. Penyebaran pengungsi dampak lahar dingin yang terkumpul di 14 lokasi penelitian dapat dideskripsikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Penyebaran Pengungsi Korban Lahar Dingin

No	Tempat Pengungsi	Jumlah	Desa Asal
1	Balai desa dan Lapangan Jumoyo	716	Gempol, Kadirogo, Kemburan, Dowakan
2	Balai Desa Seloboro	95	Klumpukan, Krapyak, SMK Negeri 1
3	Gulon	483	Prebutan
4	Balai desa Tersangede	531	Candi, Gebayan, Krapyak
5	Tempat Pendidikan Al Quran Tanjung	1.119	Salakan, Gemampang, Sirahan, Jetis, Glagah, Grojogan
6	Balai Desa dan Sekolah Dasar Sriwedari	500	Trayem, Ngemplak Lor, Purwosari
7	Sudisari II adikarto	106	Sudisari
8	Tempat Pendidikan Al Qur'an	55	Sidoarjo Prumpung
9	Balai Desa Gongosuli	22	Ngipik
10	Rumah Kepala Desa Kamongan	147	Nganggrong
11	Rumah Kepala Desa Srumbung	68	Srumbung Krajan
12	Lapangan jombangan Srumbung	120	Ngeloharjo
13	Balai Desa Ngrajek	566	Ngemplak
14	Gedung Olah Raga SD II Jamus	479	Gedolon
Jumlah		5.006	

Sumber: PPB Kabupaten Magelang (2013)

Pengungsi yang tinggal di tempat pengungsian adalah mereka yang menghadapi masalah tempat tinggal karena kerusakan rumah mereka sejak bencana erupsi dan pasca erupsi Merapi. Dalam menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari, pada siang bekerja dan berusaha seperti biasa kecuali bagi mereka yang tempat usaha dan kerjanya mengalami kerusakan. Pada saat malam hari mereka kembali ke pengungsian. Korban lahar dingin enggan tinggal di hunian sementara (huntara), penyediaan huntara

sejak erupsi merapi hanya sebagian kecil yang diminati korban, korban lebih memilih tinggal di tempat saudara yang rumahnya selamat dari lahar dingin, atau di tempat pengungsian yang lebih menjamin kebersamaan dengan warga terdampak. Dari penelusuran terhadap korban, keengganan tinggal di huntara ternyata di latar belakang oleh faktor sebagai berikut.

Huntara terletak jauh dari tempat korban biasa melakukan aktivitas kerja dan usaha sehari; Huntara bahan bangunanya tidak menjamin privasi, karena hanya terbuat dari anyaman bambu dan terpal kecil sehingga keberadaan dan aktivitas penghuni di dalamnya mudah dilihat oleh penghuni lain di sampingnya. Huntara tidak bisa melindungi sepenuhnya dari guyuran hujan deras, terpaan angin kencang, tembusan sinar matahari dari luar, dan gigitan udara dingin yang menjadi karakteristik cuaca di wilayah kaki gunung Merapi.

Korban yang terbiasa tinggal di rumah dengan batas tembok dan pekarangan yang luas merasa tidak nyaman tinggal di huntara. Kurang dari 15 persen dari korban pascaerupsi merapi yang bersedia tinggal di huntara. Mereka yang bersedia tinggal di huntara karena didorong oleh keterpaksaan tidak memiliki saudara untuk menumpang tinggal dan rumahnya rusak total oleh timbunan lahar dingin. Korban menghadapi dilema dalam bentuk, apabila ingin merehabilitasi rumahnya takut apabila banjir lahar dingin terjadi lagi, tetapi apabila tinggal di pengungsian terus menerus belum ada jaminan pelayanan dari pemerintah atau lembaga swasta (LSM) peduli korban merapi yang merencanakan untuk memberi pelayanan selama merekonstruksi dan merhabilitasi rumah tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.

Akses Sosial di Tengah Penderitaan Korban: Menyikapi bencana alam pasca erupsi, ternyata tidak sebatas memberikan pelayanan sosial kepada semua korban agar dapat kembali ke kondisi semula, tetapi ada akses sosial yang apabila tidak di perhatikan dan disikapi dapat membawa dampak kontra produktif terhadap keberhasilan pelayanan sosial yang di berikan bagi korban. Akses sosial tersebut secara konkret termanifestasi dari beberapa gelintir orang yang mencari keuntungan di tengah kesusahan

orang lain korban pasca erupsi, padahal beberapa gelintir orang tersebut meskipun hidup di daerah terdampak pasca erupsi, tetapi tidak menjadi korban.

Tinggal di Tenda Pengungsian: Ketika banyak orang menyelamatkan diri pergi ke tenda-tenda pengungsian yang jauh dari ancaman lahar dingin pasca erupsi, tidak semua orang yang tinggal di tenda merupakan korban dalam arti sebenarnya. Sebagian orang ke tenda dengan motivasi agar mereka mendapatkan pelayanan sosial, padahal tidak ada sebagian raga, jiwa, harta benda, dan sumber penghidupan mereka yang rusak sehingga berhak atas bantuan pelayanan sosial. Sejumlah orang tersebut sekedar ikut dalam euforia banjirnya berbagai bantuan, tanpa menjadi korban yang sebenarnya. Beberapa tetangga di sekitar yang mengetahui pun segan untuk melarangnya. Kehidupan masyarakat desa yang memiliki toleransi tinggi, termasuk terhadap sejumlah orang yang hanya ingin mendapatkan pelayanan sosial, menyebabkan akses sosial akibat bencana alam yang merongrong pemulihan kehidupan korban sesungguhnya sangat tinggi.

Kebutuhan Sosial Korban dan Kategori korban pasca erupsi: Dari hasil observasi kondisi korban pasca erupsi Merapi pada level mikro (perorangan), kategori korban dapat dipilah secara umum menjadi lima jenis kerugian. Kelima jenis kerugian akibat banjir lahar dingin pasca erupsi merapi tersebut dapat menimpa seorang korban. Kerugian raga, menyangkut luka ringan, luka berat tersembuhkan, dan cacat tetap. Kerugian jiwa, berkaitan dengan kondisi panik, trauma, dan perubahan mental psikologis secara temporal, dan perubahan mental-psikologis menetap. Kerugian harta benda diantaranya rumah dan perabotan rumah tangga. Kerugian sumber kehidupan diantaranya tempat usaha, kebun, dan sawah.

Kerugian Korban dan Kompensasi sebagai Pelayanan Sosial, pelayanan sosial bagi korban pasca erupsi pada level mikro (perorangan), kompensasi yang diberikan terhadap korban berupa materi yang sesuai dengan kebutuhan dan logis dengan jenis kerugiannya. Pelayanan sosial merupakan tindakan dan pemberian bantuan materi yang dapat berfungsi

mengembalikan kerugian korban yang sesuai dengan kebutuhan riil korban, dan yang lebih utama adalah bermanfaat bagi kehidupan korban. Dalam lingkungan wilayah yang secara riil menjadi tempat kejadian bencana alam, pelayanan sosial akan lebih efektif apabila secara administrasi ditangani oleh *stakeholder* yang ada di daerah, yang bekerja secara bersama-sama, sinergi, dan koordinatif. Banyak sedikitnya *stakeholder* yang terlibat dalam pelayanan sosial bagi korban bencana tergantung dari variasi kerugian korban. Jenis kerugian korban dan bentuk kompensasi pelayanan sosial yang dibutuhkan korban beserta *stakeholder* (lembaga) yang kompeten menangani dapat disistematisasikan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Jenis Kerugian Korban dan Kompensasi-Stakeholder

No	Jenis kerugian	Jenis Kompensasi	Stakeholder
1	Raga	Obat-obatan dan pelayanan medis darurat/rujuk rumah sakit	Dinas Kesehatan
2	Jiwa	Pendamping psikologi/pekerjaan sosial	Dinas Sosial dan Kesehatan
3	Harta Benda	Bahan dan peralatan rehabilitasi bangunan	Dinas kimpraswil
4	Sumber Penghidupan	Peralatan rehabilitasi kebun, ladang, sawah, sarana irigasi dan perhubungan	Dinas Kimpraswil
5	Batas lahan pekarangan, dan sumberpenghidupan	Patok batu pembatas resmi	Badan Pertanahan Nasional Daerah
6	Gangguan keamanan harta benda	Perlindungan dan pengembalian kepemilikan	Kepolisian

Pelayanan sosial pada level makro merupakan bantuan kompensasi untuk pemulihan infrastruktur yang memiliki pengaruh besar bagi mobilitas dan pemulihan kehidupan masyarakat korban pasca erupsi merapi. Kerugian pada level makro berupa kerusakan jalan, irigasi, jembatan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan sarana ekonomi (pasar). Pelayanan sosial juga mencakup pengendalian keamanan lingkungan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya

beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil kesempatan di tengah kekacauan suasana akibat bencana alam banjir lahar dingin merapi, yang salah satunya termanifestasi dalam bentuk pencurian harta benda dan sejumlah barang bantuan korban. Jenis kerugian korban dan bentuk kompensasi pelayanan sosial secara makro yang dibutuhkan korban beserta *stakeholder* (lembaga) yang kompeten menangani dapat disistematisasi dalam Tabel 7:

Tabel 7. Jenis Kerusakan Infrastruktur–
Kompensasi–Stakeholder

No	Jenis kerusakan Infrastruktur	Jenis Kompensasi	Stakeholder
1	Jalan, sarana umum, jembatan, saluran irigasi	Batu, pasir, batu, besi	Dinas Kimpraswil
2	Jaringan telepon	Kabel dan tiang telepon	Telkom
3	Jaringan listrik	Kabel dan tiang listrik	PLN

Dalam pelayanan sosial secara riil ketika bencana alam pasca erupsi terjadi, disamping eksistensi *stakeholder* lembaga pemerintah juga hadir beberapa lembaga bukan pemerintah, yang terdiri dari organisasi sosial swasta (LSM) dan kelompok masyarakat yang secara spontan memiliki kepedulian terhadap korban pasca erupsi. Dari kasus korban bencana alam pasca erupsi merapi di lima Kecamatan Kabupaten Magelang (Muntilan, Salam, Mungkid, Ngluar, dan Srumbung) dan satu Kecamatan rawan terdampak bencana pasca erupsi (Dukun), lembaga pemerintah antar daerah dan lembaga bukan pemerintah (LSM) antar daerah dan antar negara hadir dalam memberi pelayanan sosial kepada korban. Mereka melakukan pelayanan sosial berkoordinasi dengan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPB) apabila memang memungkinkan dan melakukan secara langsung bagi masyarakat yang secara mendesak membutuhkan asistensi sosial. Manifestasi pelayanan sosial yang dilakukan secara umum dapat dibagi menjadi dua: Pertama, rekonstruksi dan rehabilitasi lingkungan termasuk rumah tempat tinggal, jalan umum, sungai, sarana irigasi, jembatan, pasar, pene-

rangan, dan telekomunikasi umum. Kedua, pemberian bantuan logistik berupa bahan makanan, pakaian, tenda tempat tinggal darurat, selimut, termasuk uang jaminan hidup selama proses adaptasi kembali ke kehidupan semula sebelum terjadi bencana.

Dari kajian empirik pelayanan sosial korban pasca erupsi merapi, distribusi bantuan logistik lebih efektif apabila di tekankan pada level Kabupaten, tidak pada level provinsi. Selain lokasi provinsi secara geografis sangat jauh dengan daerah terdampak sehingga pemantauan perkembangan situasi sulit dilakukan secara langsung dan responsif. Prosedur hirarkis realisasi pelayanan sosial dari level provinsi ke dusun tempat eksistensi korban berada secara riil juga panjang, padahal pelayanan sosial bagi korban membutuhkan proses yang cepat dan responsif. Ketiadaan lembaga pengendali pelayanan sosial yang kuat, berwibawa, dan paham secara mendalam tentang masalah penanganan sosial pada tingkat kabupaten, menyebabkan berbagai bantuan yang termanifestasi dalam berbagai jenis makanan ringan dan kemanfaatan tidak terbagi secara merata dan tidak sampai kepada korban menurut kebutuhan dan kerugian yang dihadapi.

Namun bagaimanapun pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan dan swasta, secara umum sangat bermanfaat bagi peringanan beban yang di derita korban pasca erupsi Merapi. Beberapa kekurangan dalam gerak pelayanan sosial setiap adanya bencana alam, termasuk bencana alam pasca erupsi merapi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dalam bentuk pelayanan sosial sinergi yang dapat saling mengisi dan menopang dalam membantu korban memulihkan kondisi kehidupannya. Sikap egoisme masing-masing lembaga membawa konsekuensi rentan terjadinya duplikasi bantuan dalam berbagai bentuk. Dari hasil pengamatan terhadap berlangsungnya distribusi bantuan, ada empat hal yang menjadi penyebab kacanya mekanisme distribusi bantuan: Pertama, egoisme masing-masing lembaga (pemerintah dan swasta) dalam mendekati kurban. Kedua, antusiasme spontan masyarakat peduli korban yang asal memberi bantuan tanpa pertimbangan

kemerataan. Ketiga, lemahnya eksistensi BDPB dalam memetakan korban dan mengendalikan segala aliran bantuan. Keempat, korban bergerak sendiri-sendiri, baik secara perorangan maupun bersama mencari upaya bantuan. Beberapa lembaga pemerintah, swasta, dan kelompok spontanitas masyarakat yang aktif melakukan pelayanan sosial tersebut.

E. Penutup

Kesimpulan: Dari hasil penelitian korban pasca erupsi Gunung Merapi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan pelayanan sosial merupakan berbagai sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi aspek: kejelasan tentang definisi, ruang lingkup, tindakan dan tahapan, kesimpulan yang dapat diajukan sebagai berikut. Pelayanan sosial korban pasca erupsi Gunung Merapi merupakan kompensasi dalam bentuk pemberian bantuan (materi), dan tindakan (non-materi) kepada korban sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhan korban, bahkan bila mungkin menjadikan korban secara sosial lebih tahan terhadap ancaman bencana alam pada kemudian hari. Pelayanan sosial secara kongkret termanifestasi dalam bentuk pemulihan kondisi raga, kejiwaan (psikis), harta benda, sumber penghidupan, dan infrastruktur yang bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pemulihan kondisi kehidupan korban. Pelayanan sosial terbagi dalam dua lingkup, mikro yang menyangkut kondisi korban secara perorangan (individu) dan makro yang menyangkut infrastruktur (irigasi, jembatan, jalan, penerangan dan telekomunikasi umum, pasar) dalam kaitan dengan pemulihan kehidupan masyarakat. Pelayanan sosial termanifestasi dalam bentuk pemberian bantuan kepada korban dalam bentuk materi (bahan makanan, pakaian, perangkat tidur, uang saku peralatan rehabilitasi fisik sumber kehidupan, obat-obatan, tenda, rumah hunian sementara) dan dalam bentuk tindakan (terapi kesehatan psikologi, hiburan, pembenahan sarana penerangan dan telekomunikasi). Pemangku tanggung jawab (*stakeholder*) demi terlaksananya pelayanan sosial secara terencana, terpadu, dan terarah membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga

pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat peduli korban bencana alam pasca erupsi gunung merapi. Ujung tombak implementasi pelayanan sosial pada prakteknya sangat bertumpu pada peranan kepala dusun, rukun warga dan rukun tangga, karena ketiga aparat tersebut merupakan pejabat administrasi pada tingkat pemerintahan paling bawah yang mengetahui secara langsung kondisi lingkungan masing-masing warganya akibat dampak bencana alam pasca erupsi merapi.

Rekomendasi: Mengacu pada kesimpulan tentang kebutuhan pelayanan sosial yang meliputi definisi, ruang lingkup, tindakan, dan tahapan. Aparat atau individu yang melakukan pelayanan sosial bagi korban pasca erupsi Gunung Merapi sebaiknya memahami secara mendalam tentang orang yang termasuk kategori korban pasca erupsi, termasuk kategori (raga, jiwa, harta benda, sumber penghidupan) dan gradasi kerugian (ringan, sedang, berat, sangat berat) yang dialami korban pada level mikro (perorangan) dan makro (umum), agar pelayanan sosial dapat diberikan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing korban. Lembaga baik pemerintah maupun swasta, yang menjadi pemangku tanggung jawab (*stakeholder*) dalam pelayanan sosial pasca erupsi merapi, seharusnya bertidak dalam satu koordinasi pada level kabupaten/kota tempat bencana alam erupsi terjadi. Koordinasi dalam satu lembaga diperlukan agar bantuan dapat menyentuh korban secara merata, terstandar satuan pelayanan sosial, sampai secara langsung pada korban, menjawab permasalahan, kebutuhan korban, dan serentak distribusinya. Sebagai ujung tombak dalam melakukan mediasi pelayanan sosial, fungsi kepala dusun, rukun warga, dan rukun tangga perlu dimaksimalkan, karena aparat pemerintah yang paling bawah (kepala dusun, RT, RW) tersebut yang paling mengetahui kondisi masing-masing warga di lingkungannya.

Pustaka Acuan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), (2013). *Merapi Pemulihan Penghidupan Warga Pasca Letusan 2010*. Yogyakarta: UNDP Indonesia.

- Carter, William Nick (1991). *Bencana Alam*. www.google.co.id diakses tgl 21 April 2012.
- Dian Widyaningrum (2007), *Bencana Alam*. Bulentim Malimpa. Edisi 1/II/2007.
- Morrow, Jason (2011), *Faktor Penyebab Bencana*, www.http://blueskywinter.blogspotcom.
- Gunanto Surjono (2013), *Merancang Kebijakan Sosial Menejemen Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, (2010), *Managemen Bencana dan Tindakan Ter-hadap Bencana*, Yogyakarta: Metpress
- Kementerian Sosial.go.id. (21008). *Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial*, www.google.go.id. Diakses 21 Maret 2013.
- Quarentelli. (1998). *Mayor Criteria for Judging Disaster Planning and Their Applicability in Developing Societies*. Delaware: University of Delaware.
- Sunit Agus Tricahyano, (2011), *Kajian Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Bencana Banjir Bandang di Wasior*, Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Wahlstrom, Margareta (2013), *Counting Economic Losses from Disaster*. Jakarta: Gramedia.

